

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUJAHIDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 863601

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 208.880.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 86.160.000
2. Tanah Seluas 335 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 53.600.000
3. Tanah Seluas 1.080 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 69.120.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 269.000.000

1. MOBIL, HONDA BRF STATION WAGON Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 696.985.852**F. HARTA LAINNYA** Rp. 109.370.550**Sub Total** Rp. 1.285.236.402**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.285.236.402

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.